KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Beras murah dioplos, komisi IV harapkan SPHP tepat sasaran
Tanggal : Minggu, 01 November 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Beras Murah Dioplos

Komisi IV Harapkan SPHP Tepat Sasaran

FOTO: DPR.GO.ID



Usman Husin

ANGGOTA Komisi IV DPR Usman Husin mendukung langkah Kementerian Pertanian (Kementan) membongkar dugaan penyalahgunaan 600 ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Pengusutan tuntas kasus ini akan memutus mata rantai permainan mafia beras bersubsidi yang merugikan masyarakat luas.

"Jangan sampai program yang seharusnya meringankan beban masyarakat justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan pribadi," ujar Usman di Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) beras SPHP yang diduga dioplos dan kembali dijual dengan harga yang lebih mahal. Dalam sidak tersebut, ditemukan 600 ton beras SPHP yang dijual sebagai beras premium seharga Rp 17.000 per kilogram (kg). Padahal, beras yang disubsidi Pemerintah ini seharusnya dijual seharga Rp 12.500 per kg.

"Ini beras untuk saudara-saudara kita yang berada di desil 1, 2, 3, 4, bahkan 5 ini sangat dibutuhkan. Tetapi mereka masih bisa melakukan perampokan, dia lakukan ini (pengoplosan beras)," ucap Amran di Rumah Beras Kayumanis, Jakarta Timur, Rabu (28/10/2026).

Usman menyoroti temuan Kementan mengenai beras SPHP yang seharusnya dijual seharga Rp12.500 per kilogram, tetapi diduga dicampur dan dikemas ulang menjadi beras premium lalu dijual dengan harga melonjak hingga Rp 17.000 per kilogram. Praktik pemalsuan dan pengoplosan tersebut dinilai sangat mencederai komitmen Pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan nasional.

Usman mengingatkan, penanganan kasus ini tidak boleh berhenti hanya pada pengungkapan jumlah beras yang disalahgunakan. Tetapi, harus jelas siapa yang bermain, bagaimana modusnya, dan jika ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan dari program masyarakat, mesti ditindak tegas sesuai hukum.

Karena itu, ia meminta Pemerintah memperketat seluruh rantai pasok distribusi pangan, mulai dari gudang Perum Bulog hingga ke distributor dan pedagang eceran. Sistem pengawasan digital dan pelacakan pasokan akan mencegah praktik pengalihan maupun pengemasan ulang beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Menurut Usman, pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan pemeriksaan setelah pelanggaran terjadi. Pemerintah perlu membangun sistem distribusi yang transparan, memperketat pengawasan terhadap mitra penyalur, serta memastikan setiap tahapan penyaluran dapat ditelusuri. ■ TIF